

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENGGANTIAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK MENJADI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh
AFIFA MARSA PUTRI

Transformasi digital merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan zaman saat ini. Hal ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan yang secara perlahan terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi. Dampak luas dari teknologi informasi telah mendorong penerapannya dalam sistem administrasi penduduk di Indonesia melalui digitalisasi administrasi kependudukan. Kurangnya pemahaman pemanfaatan digitalisasi administrasi kependudukan masih terlihat jelas di masyarakat.

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah: (1) Mengapa pergantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan? (2) Bagaimana Pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perlunya penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik menjadi IKD di Kabupaten Lampung Selatan karena untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang *Information Technology* (IT) dan sebagai solusi dari masalah dalam kelangkaan blanko KTP-e karena permintaan perekaman dan pencetakan kartu identitas tinggi. (2) Dalam pelaksanaannya, pergantian IKD di Kabupaten Lampung Selatan belum optimal karena perolehan aktivasi IKD baru mencapai 14,04% dari banyaknya Desa dan Kelurahan yang ada, dan pada praktik di lapangan pelayanan apapun masih membutuhkan KTP berbentuk fisik. Minat masyarakat mencari tahu tentang pentingnya IKD juga sangat rendah. Kebijakan ini belum terlaksana dengan optimal sehingga harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Kata kunci: Kartu Tanda Penduduk, Identitas Kependudukan Digital, Kabupaten Lampung Selatan

ABSTRACT**POLICY OF REPLACING ELECTRONIC IDENTITY CARD
TO IDENTITY OF RESIDENCE DIGITAL (IKD)
IN SOUTH LAMPUNG REGENCY**

By
Afifa Marsa Putri

Digital transformation is something that cannot be avoided in today's development. This can be seen from various aspects of life that are slowly affected by advances in information technology. The broad impact of information technology has encouraged its application in the population administration system in Indonesia through the digitization of population administration. Lack of understanding of the utilization of digitization of population administration is still evident in the community.

The problems in this study are: (1) Why is the replacement of the Electronic Identity Card to Digital Population Identity (IKD) in South Lampung Regency necessary? (2) How is the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in South Lampung Regency?. This research uses empirical normative research methods with primary data and secondary data, where each data is obtained from library research and field research.

The results of this study show: (1) The need to replace the Electronic Identity Card to IKD in South Lampung Regency is to take advantage of technological advances in the field of Information Technology (IT) and as a solution to the problem of scarcity of KTP-e blanks due to high demand for recording and printing identity cards. (2) In its implementation, the replacement of IKD in South Lampung Regency has not been optimal because the acquisition of IKD activation has only reached 14.04% of the total number of villages and sub-districts, and in practice in the field any service still requires a physical KTP. Public interest in finding out about the importance of IKD is also very low. This policy has not been implemented optimally so it must be a concern of the regional government of South Lampung Regency.

Keywords: Identity Card, Digital Population Identity, South Lampung Regency